
ANALISIS KEBIJAKAN KARTU TANI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN BANYUMAS

Chanifia Izza Millata^{1✉}, Dimas Purbo Pambudi², Khairurrizqo³

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman
chanifia.izza@unsoed.ac.id

Abstrak

Kebijakan Kartu Tani diluncurkan pemerintah sejak 2016 untuk memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas dijalankan dan ditafsirkan oleh aktor lapangan, serta dampak diskresi mereka terhadap akses pupuk dan pemberdayaan petani. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky dan teori Pemberdayaan Naila Kabeer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kartu Tani tidak berjalan seragam dan sangat bergantung pada diskresi aktor lapangan untuk mengatasi keterbatasan teknis dan administratif. Diskresi tersebut membantu menjaga akses pupuk, tetapi sekaligus memunculkan praktik informal dan ketergantungan petani. Dari sisi pemberdayaan, kebijakan ini baru menghasilkan pemberdayaan administratif dan belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi maupun posisi tawar petani secara substantif.

Kata kunci: kartu tani; kebijakan pupuk bersubsidi; implementasi kebijakan; *street-level bureaucracy*; pemberdayaan petani

Abstract

The Farmer Card (Kartu Tani) policy was introduced in 2016 to improve the distribution of subsidized fertilizer and enhance farmers' welfare. However, its local implementation continues to face significant challenges. This study examines how the Farmer Card policy is implemented and interpreted by street-level actors in Banyumas Regency, as well as how their discretion affects farmers' access to subsidized fertilizer and empowerment. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observation, and document analysis. The study applies Michael Lipsky's Street-Level Bureaucracy theory and Naila Kabeer's Empowerment framework. The findings reveal that policy implementation is uneven and heavily dependent on the discretion of local implementers to cope with technical and administrative constraints. While such discretion helps maintain fertilizer access, it also generates informal practices and reinforces farmers' dependency. In terms of empowerment, the policy mainly produces administrative access rather than substantive empowerment that strengthens farmers' economic independence and bargaining power.

Keyword: farmer card policy; subsidized fertilizer policy; policy implementation; *street-level bureaucracy*; farmer empowerment

A. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai penyedia pangan, sumber lapangan kerja, maupun penopang kehidupan masyarakat pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023), sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam sistem pertanian nasional (Wahid et al., 2021).

Dalam praktiknya, program pupuk bersubsidi masih belum berjalan optimal karena distribusinya yang tidak tepat sasaran dan kurang efisien. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan kartu tani sebagai solusi untuk mempermudah proses distribusi pupuk bersubsidi.

Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian adalah subsidi pupuk. Subsidi ini diharapkan

mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen petani. Namun, dalam praktiknya, distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya pengawasan, serta potensi kebocoran dalam penyaluran (Anbiya H, 2024). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan Kartu Tani sebagai upaya reformasi sistem distribusi pupuk bersubsidi.

Kartu Tani merupakan kartu debit yang terintegrasi dengan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan digunakan untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank Rakyat Indonesia di Kios Pupuk Lengkap (Kementrian Pertanian, 2020). Kebijakan ini mulai diterapkan secara terbatas di Jawa Tengah sejak 2015 dan diperkuat secara nasional melalui berbagai regulasi, dengan ketentuan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yaitu tentang ketentuan umum, pupuk bersubsidi, Jenis pupuk organik dan Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat.

Pada tahun 2017, pemerintah melakukan uji coba pemberlakuan kartu tani di lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Selanjutnya di tahun 2018, uji coba pemberlakuan kartu tani diperluas ke sepuluh provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah.

Perluasan kebijakan kartu tani bertujuan agar seluruh petani yang ada di Indonesia memiliki kemudahan akses yang sama dalam memperoleh subsidi pupuk dari pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk kesejahteraan petani dalam mendapatkan harga barang produksi yang terjangkau dan konsistensi kualitas hasil panen yang telah didapatkan. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya pun kebijakan ini masih

mengalami banyak kendala. Mulai dari langkanya ketersediaan pupuk, harga pupuk yang meroket, serta adanya praktik nakal dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain dari sisi implementasi yang masih belum maksimal, ada indikasi intervensi dari faktor politik seperti politisasi kebijakan hingga praktik korupsi, suap, monopoli dan adanya mafia pupuk (Anbiya H, 2024). Hal ini semakin membuat pelaksanaan kebijakan kartu tani menjadi terhambat dan sulit untuk berjalan optimal.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah percontohan awal implementasi Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2016. Meskipun telah berjalan cukup lama, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketidaksinkronan data, hingga rendahnya literasi digital petani (Elsa Catriana, 2024). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan serius seperti langkanya ketersediaan pupuk, ketidaksesuaian data antara petani dan kios, berkurangnya jumlah Kios Pupuk Lengkap (KPL), serta rendahnya literasi digital petani dalam mengoperasikan sistem. Kondisi ini diperparah dengan adanya indikasi intervensi politik, seperti politisasi kebijakan, praktik korupsi, monopoli, dan munculnya “mafia pupuk” yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Padahal pemerintah sendiri sudah menambah volume pupuk subsidi tahun ini menjadi 9,55 juta ton dari yang sebelumnya hanya 4,7 juta ton (Nomita & Ramadhoni, 2022). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Tani tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik di tingkat lokal.

Permasalahan dapat dilihat dari sulitnya petani di Banyumas dalam memperoleh pupuk di kios-kios yang tersedia meskipun pemerintah menyampaikan sudah menambah volume pupuk subsidi dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Data per Mei 2024 yang diperoleh dari Kompas.com, jumlah penyaluran pupuk subsidi yang sudah disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia per awal Mei 2024 ada sebanyak 1,93 juta ton (Elsa

Catriana, 2024). Angka ini masih 20,3 persen dari total alokasi pupuk subsidi yang sebesar 9,55 juta ton. Selain itu, perubahan kebijakan yang cepat juga menambah beban adaptasi petani. Kini, tata cara klaim pupuk subsidi yang sebelumnya wajib menggunakan Kartu Tani telah digantikan dengan sistem berbasis KTP melalui aplikasi “iPubers”, yang kembali menimbulkan kebingungan di kalangan petani (Minarsih et al., 2023).

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Tani tidak hanya menghadapi kendala teknis dan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik yang kompleks. Hal ini membuat keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada aktor pelaksana di tingkat bawah yang berinteraksi langsung dengan petani (Nova et al., 2024).

Dalam konteks ini, teori Street-Level Bureaucracy dari Michael Lipsky (Lipsky, M., 1980) digunakan untuk menjelaskan bagaimana para pelaksana kebijakan di tingkat bawah—seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kios Pupuk Lengkap (KPL), dan petugas BRI—memiliki diskresi, yaitu kebebasan dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Teori ini menekankan bahwa kebijakan publik di tingkat masyarakat sering kali berbeda dari rancangan formalnya karena dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan para birokrat lapangan (*street-level bureaucrats*).

Sementara itu, teori Pemberdayaan dari Naila Kabeer (Kabeer, 2001) digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan Kartu Tani mampu meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses sumber daya (*resources*), mengambil keputusan (*agency*), dan mencapai kesejahteraan yang nyata (*achievement*). Dari kerangka ini, penelitian menilai apakah kebijakan Kartu Tani benar-benar berhasil memberdayakan petani atau justru menciptakan ketergantungan baru terhadap sistem birokrasi dan perantara kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah implementasi kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas dengan melihat peran dan diskresi aktor lapangan dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pemberdayaan petani dari aspek ekonomi dan sosial.

Tujuan dan Urgensi dalam penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis bagaimana kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas dijalankan dan ditafsirkan oleh aktor lapangan (PPL, KPL, dan BRI) dalam praktik implementasinya, dengan menggunakan teori *Street-Level Bureaucracy* dari Michael Lipsky untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat bawah dan peran diskresi birokrat lapangan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana diskresi aktor lapangan memengaruhi akses petani terhadap pupuk bersubsidi serta berdampak pada pemberdayaan petani dari aspek ekonomi dan sosial, dengan menggunakan teori *Pemberdayaan* dari Naila Kabeer untuk menilai sejauh mana kebijakan ini meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas dijalankan dan ditafsirkan oleh aktor lapangan dalam praktik sehari-hari. Kedua, bagaimana diskresi aktor lapangan memengaruhi akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ketiga, bagaimana dampak implementasi kebijakan Kartu Tani terhadap pemberdayaan petani, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Pertanyaan penelitian ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis sehingga pembahasan difokuskan pada implementasi kebijakan, dampak ekonomi, dan dampak sosial yang muncul dari pelaksanaan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini memiliki urgensi strategis karena berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meninjau aspek administratif kebijakan Kartu Tani, tetapi juga menyoroti dimensi sosial-politik dan pemberdayaan yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Banyumas.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dianalisis dengan analisa deskriptif. Dalam analisa deskriptif peneliti tidak melakukan uji terhadap hipotesis seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif, namun memberikan gambaran secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dengan didukung dengan data yang diperoleh (Bogdan, R., 2007). Pendekatan penelitian akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah pelaksana awal program Kartu Tani sejak tahun 2016.

Lokasi ini dipilih karena Banyumas menjadi wilayah percontohan implementasi awal Kartu Tani di Jawa Tengah; Memiliki dinamika pelaksanaan yang beragam dan kompleks, mulai dari kendala teknis hingga sosial-politik; Adanya variasi antara kecamatan dalam hal akses petani terhadap pupuk bersubsidi serta efektivitas peran PPL dan KPL. Penelitian lapangan difokuskan pada beberapa kecamatan yang memiliki intensitas kegiatan pertanian tinggi dan menjadi sentra distribusi pupuk bersubsidi, antara lain Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Purwokerto Timur. Lokasi-lokasi tersebut dipilih untuk mewakili perbedaan kondisi geografis dan tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Penelitian lapangan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dengan wawancara dilakukan secara bertahap hingga data yang diperoleh mencapai saturasi, yaitu ketika informasi yang muncul telah berulang dan tidak menghasilkan temuan substantif baru. Saturasi data ditandai dengan kesamaan pola pengalaman dan permasalahan yang disampaikan oleh petani, pengelola kios, serta aktor institusional terkait, khususnya mengenai kendala teknis, diskresi lapangan, dan keterbatasan dampak pemberdayaan kebijakan.

Informan penelitian berjumlah 12 orang, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan Kartu Tani. Informan tersebut terdiri atas 5 petani penerima Kartu Tani dari beberapa desa di Kecamatan Banyumas (Desa Dawuhan, Pekunden, Kalisube, Kedunguter, dan Kedunggede), 5 pengelola Kios Pupuk Lengkap (KPL) dari berbagai desa, 1 pejabat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, serta 1 perwakilan Bank BRI yang terlibat dalam pencetakan dan pengelolaan sistem Kartu Tani.

Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Teknik mengumpulkan data dari dokumen dan atau sumber-tertulis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, yang relevan dengan kebijakan Kartu Tani dan pemberdayaan petani. Sumber data bisa meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan pemerintah, dokumen evaluasi pelaksanaan Kartu Tani, serta hasil penelitian terdahulu (Creswell JW, n.d.). Teknik ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis, memahami konteks kebijakan, dan merumuskan indikator-indikator pemberdayaan petani yang akan dianalisis dalam konteks Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai informan kunci yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas. Informan terdiri dari petani penerima manfaat, pengelola kios pupuk, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, serta perwakilan Bank BRI.

c. Teknik Observasi

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan permasalahan. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk subsidi melalui Kartu Tani, interaksi antara petani dengan lembaga pelaksana kebijakan, dan dinamika kegiatan kelompok tani. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan secara faktual dan objektif bagaimana kebijakan ini dijalankan di level bawah serta bagaimana kondisi-kondisi nyata yang mencerminkan pemberdayaan atau justru hambatan bagi petani di tingkat lokal.

Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas.

Dalam proses reduksi data, peneliti melakukan pengkodean (*coding*) terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul secara berulang. Kode-kode awal kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti kendala teknis penggunaan Kartu Tani, praktik diskresi aktor lapangan, akses petani terhadap pupuk bersubsidi, serta dampak ekonomi dan sosial kebijakan. Dari kategori tersebut, peneliti membangun tema-tema utama yang menjadi dasar analisis, yaitu implementasi kebijakan Kartu Tani, peran diskresi birokrat lapangan, dampak ekonomi kebijakan, dan dampak sosial terhadap relasi kelembagaan petani. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis

menggunakan teori *Street-Level Bureaucracy* dari Michael Lipsky dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer.

- (1) Pengumpulan Data. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani penerima Kartu Tani, pengelola Kios Pupuk Lengkap (KPL), perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, serta Bank BRI. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kartu Tani.
- (2) Reduksi Data. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan isu-isu yang berulang, seperti kendala teknis penggunaan Kartu Tani, praktik diskresi aktor lapangan, akses petani terhadap pupuk bersubsidi, serta dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan petani.
- (3) Penyajian Data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu implementasi kebijakan Kartu Tani, dampak ekonomi kebijakan, dampak sosial dan relasi kelembagaan, serta dinamika administratif dalam pelaksanaannya.
- (4) Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan ditarik melalui proses interpretasi terhadap tema-tema yang telah ditemukan dan dianalisis menggunakan teori *Street-Level Bureaucracy* dari Michael Lipsky dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer untuk menjelaskan dinamika implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap pemberdayaan petani.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108° 39' 17" sampai 109° 27' 15" dan di antara garis Lintang Selatan 7° 15' 05" sampai 7° 37' 10" yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Wilayah utara berbatasan dengan Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Pemalang. Wilayah selatan berbatasan dengan kabupaten Cilacap, wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di belahan selatan khatulistiwa. Demikian Juga karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari permukaan pantai/lautan maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak, namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir nampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 derajat C - 30,9 derajat C (*Gambaran Umum Kabupaten Banyumas*, 2025)

Sektor pertanian merupakan potensi Kabupaten Banyumas. Komoditas utama pertanian berupa tanaman pangan. Selain tanaman pangan, sektor perkebunan Kabupaten Banyumas turut berkontribusi dalam

sektor pertanian. Komoditas perkebunan yang paling banyak di produksi di Kabupaten Banyumas adalah Kelapa deres. Sementara komoditas Karet banyak diproduksi di wilayah Kecamatan Somagede, Banyumas dan Kemranjen. Selain itu juga terdapat Budidaya Anggur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak. Adapun salah satu upaya ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas dengan adanya pengembangan kedelai lokal pada sentra pengrajin tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran (*Pertanian*, n.d.).

Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk subsidi untuk 10 komoditas utama yang dianggap strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Komoditas tersebut meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu, kemudian tanaman hortikultura meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta tanaman perkebunan, seperti kopi, kakao, dan tebu rakyat. Kementerian Pertanian juga menetapkan standar penggunaan pupuk subsidi untuk tanaman padi, yakni 250 kilo gram pupuk Urea dan NPK per hektar lahan. Dengan alokasi yang jelas ini, diharapkan para petani bisa memperoleh hasil panen yang optimal dan mendukung ketahanan pangan yang lebih baik.

Berdasarkan data sensus pertanian di Banyumas, terdapat beberapa jenis usaha pertanian diantaranya adalah tanaman pangan, padi, palawija, perkebunan, hortikultura dan usaha pertanian lainnya. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, ada 4 komoditas unggulan yang menjadi andalan pada sektor hortikultura tahun 2024 yaitu Petsa/Sawi 24 ribu kuintal, Cabai Rawit 11 ribu kuintal, Cabai Keriting 6 ribu kuintal, Kacang Panjang 4 ribu kuintal. Komoditas-komoditas ini tidak hanya mendukung kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat Banyumas. Kecamatan Sumbang dan Pekuncen merupakan kecamatan dengan ragam hasil tanaman hortikultura terbanyak di Kabupaten Banyumas yakni 13 Komoditas (Statistik, 2025).

Berdasarkan data pada awal pengimplementasian kartu tani, terdapat sekitar 78.000 orang petani di Kabupaten Banyumas yang terdata sebagai

penerima kartu tani sejak tahun 2017 (*Bupati Banyumas Serahkan 78.000 Kartu Tani*, 2017) dan hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 91.608 petani di Banyumas (Effendy, 2025). Admin kartu tani Balai Penyuluh Pertanian (BPP) secara berkala melakukan validasi data kartu tani. Guna diunggah ke e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) alokasi pupuk subsidi setiap tahunnya. Para admin kartu tani, seperti di Kecamatan Sumpiuh mendata hingga pada tahun 2024 mencapai jumlah petani mencapai 4.137 orang. Luas lahan sawah yang digarap petani dalam kurun waktu tiga musim tanam yaitu 5.569,055 hektare (Rahmawati, 2024).

Implementasi Kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas

Kebijakan Kartu Tani merupakan salah satu langkah reformasi pemerintah dalam menata sistem distribusi pupuk bersubsidi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah yang sejak awal ditunjuk sebagai lokasi penerapan program ini pada tahun 2016. Secara konseptual, kebijakan ini dirancang untuk meminimalkan kebocoran pupuk subsidi sekaligus meningkatkan efisiensi data penerima manfaat melalui integrasi dengan sistem perbankan dan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi Kartu Tani di Banyumas tidak berjalan seragam. Perbedaan kondisi sosial, infrastruktur, serta kapasitas birokrat lapangan membuat pelaksanaannya bervariasi antarwilayah. Di beberapa desa seperti Kalisube, sebagian petani menganggap Kartu Tani memberikan manfaat karena membuat penyaluran pupuk lebih teratur dan harga menjadi lebih stabil. Mereka menilai sistem digitalisasi melalui EDC membantu mencatat transaksi dengan lebih transparan. Pada wilayah lain, petani mengeluhkan banyaknya kendala teknis dan administratif. Beberapa di antaranya mengalami kegagalan transaksi karena mesin EDC error, data RDKK tidak sinkron, atau kartu tani terblokir. Selain itu, kuota pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dianggap tidak mencukupi kebutuhan lahan mereka. Akibatnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi,

sehingga biaya produksi meningkat (Laporan Wawancara Kartu Tani, 2025).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa berbagai kendala tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada proses penebusan pupuk di tingkat petani. Beberapa petani mengaku pernah mengalami kegagalan transaksi akibat kartu yang terblokir atau data yang belum diperbarui dalam sistem. Dalam kondisi demikian, petani harus menunggu proses pembaruan data atau meminta bantuan kepada pengelola kios dan kelompok tani untuk memperoleh pupuk yang dibutuhkan. Situasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya ditentukan oleh ketersediaan pupuk, tetapi juga oleh kemampuan petani beradaptasi dengan mekanisme administratif yang berlaku.

Dalam kerangka teori Street-Level Bureaucracy oleh Michael Lipsky (1980), kondisi ini mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh birokrat lapangan (*street-level bureaucrats*). Mereka berada di posisi paling dekat dengan masyarakat, tetapi bekerja dengan keterbatasan sumber daya, tekanan administratif, serta ekspektasi dari masyarakat. Akibatnya, mereka sering kali menggunakan diskresi, yaitu kebebasan untuk menafsirkan dan menyesuaikan aturan agar kebijakan tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan.

Fenomena ini tampak jelas pada praktik yang dilakukan oleh Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan kelompok tani (Poktan) di Banyumas. Beberapa KPL, misalnya, memperbolehkan petani bertransaksi menggunakan KTP ketika Kartu Tani bermasalah. Di Desa Kedunguter, kelompok tani bahkan mengelola kartu secara kolektif agar proses pembelian pupuk tidak terhambat. Walaupun langkah ini bertentangan dengan ketentuan formal, praktik tersebut dianggap sebagai bentuk adaptasi birokrat lapangan terhadap kondisi lokal (Nova et al., 2024).

Dengan demikian, kebijakan Kartu Tani yang secara formal diatur secara nasional ternyata mengalami reinterpretasi di tingkat lokal, di mana pelaksana kebijakan menciptakan mekanisme informal agar kebijakan tetap

berfungsi. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak bersifat linear, melainkan terbentuk dari interaksi antara kebijakan formal dan praktik adaptif di lapangan.

Dinamika tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara logika kebijakan pusat yang menekankan standardisasi dan logika lapangan yang menuntut fleksibilitas. Praktik-praktik informal yang muncul menjadi indikator kapasitas adaptif aktor lokal dalam menjaga keberlangsungan akses pupuk bagi petani. Namun, ketergantungan pada diskresi juga menandakan lemahnya desain kebijakan dalam mengantisipasi keragaman konteks lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menormalisasi penyimpangan prosedural dan melemahkan akuntabilitas kebijakan, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan Kartu Tani sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengintegrasikan fleksibilitas lokal ke dalam kerangka kebijakan formal.

Dampak Ekonomi Kebijakan Kartu Tani

Dari sisi ekonomi, kebijakan Kartu Tani memberikan dampak yang terbatas bagi kesejahteraan petani. Tujuan utama program ini adalah memastikan petani memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan agar dapat meningkatkan hasil panen dan menurunkan biaya produksi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan petani belum signifikan. Sebagian besar petani menyatakan bahwa subsidi pupuk memang sedikit membantu meringankan biaya produksi, tetapi kuota pupuk yang diberikan jauh di bawah kebutuhan aktual lahan mereka. Di sisi lain, pupuk non subsidi yang harus dibeli untuk menutupi kekurangan kuota memiliki harga yang jauh lebih mahal. Akibatnya, total biaya produksi tidak banyak berkurang dan bahkan dalam beberapa kasus meningkat (Laporan Wawancara Kartu Tani, 2025).

Dalam kerangka teori pemberdayaan Naila Kabeer (Kabeer, 2001), kondisi ini menunjukkan lemahnya dimensi *resources* (sumber daya). Petani memang mendapatkan akses formal terhadap pupuk bersubsidi, tetapi

sumber daya yang diberikan terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Petani tidak memiliki kontrol penuh terhadap ketersediaan maupun penentuan jenis pupuk yang dibutuhkan.

Aspek *agency* (kemampuan membuat pilihan) juga rendah, karena sistem Kartu Tani bersifat sentralistik—petani tidak dapat menentukan jumlah pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan, melainkan hanya menerima alokasi berdasarkan data RDKK yang sudah ditetapkan. Akibatnya, dimensi *achievement* (hasil nyata) juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Produktivitas pertanian cenderung stagnan, sementara pendapatan petani tidak meningkat secara berarti (Desa et al., 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi ekonomi, kebijakan Kartu Tani belum berhasil menciptakan pemberdayaan substantif, melainkan hanya memberikan pemberdayaan administratif—petani sekadar menjadi penerima kebijakan tanpa kendali nyata atas sumber daya pertaniannya.

Selain itu, keterbatasan dampak ekonomi Kartu Tani juga mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih menekankan pada pengendalian distribusi subsidi dibandingkan penguatan posisi ekonomi petani. Kebijakan ini akan efektif digunakan sebagai instrumen kontrol fiskal dan administratif negara, tetapi kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan produksi di tingkat petani. Dalam praktiknya, petani menanggung risiko selisih biaya produksi akibat ketidaksesuaian antara alokasi pupuk dan kebutuhan riil lahan, sementara negara relatif terbebas dari tekanan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk melalui Kartu Tani lebih berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi kebijakan publik daripada alat transformasi kesejahteraan petani.

Dampak Sosial dan Relasi Kelembagaan

Dari sisi sosial, Kartu Tani tidak membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan relasi antar petani. Hubungan antar petani, maupun antara petani dengan penyuluh dan kios pupuk, pada dasarnya tetap sama seperti sebelum adanya program ini. Namun, memang muncul pola

interaksi baru dalam bentuk pengumpulan kartu secara kolektif oleh ketua kelompok tani untuk memudahkan proses administrasi pembelian pupuk. Hal ini dikarenakan banyak petani yang tidak memahami teknis pennebusan pupuk bersubsidi sehingga perlu dikoordinir melalui Gabungan Kelompok Tani yang ada di desa masing-masing.

Praktik tersebut awalnya bertujuan efisiensi, tetapi berpotensi mengurangi kemandirian individu petani dan menimbulkan risiko penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, ketua kelompok tani memiliki kewenangan besar atas penggunaan kartu, sehingga petani biasa kehilangan kendali atas akses subsidi mereka. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya ketimpangan sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam sistem Kartu Tani, hanya petani yang memiliki lahan dengan bukti kepemilikan sah yang terdaftar sebagai penerima subsidi. Sementara itu, petani penggarap yang tidak memiliki lahan harus bergantung pada pemilik lahan untuk dapat membeli pupuk bersubsidi.

Dalam perspektif Kabeer (2001), fenomena ini menggambarkan rendahnya *agency* bagi kelompok penggarap. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan produktif terkait lahan yang mereka kelola. Kondisi ini justru memperkuat struktur ketergantungan sosial di pedesaan, di mana akses terhadap sumber daya pertanian masih sangat ditentukan oleh status kepemilikan dan posisi sosial seseorang.

Dinamika Politik dan Administratif dalam Implementasi Kartu Tani

Implementasi Kartu Tani juga tidak lepas dari pengaruh politik dan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sistem Kartu Tani dianggap terlalu birokratis karena melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Pertanian, distributor pupuk, BRI, dan kelompok tani. Banyak petani mengeluhkan proses administrasi yang panjang dan sistem verifikasi berlapis. Memasuki awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat perubahan kebijakan yang mengarah pada penyederhanaan sistem distribusi pupuk. Penggunaan Kartu Tani mulai digantikan dengan sistem berbasis KTP melalui aplikasi I-

Pubers sejak tahun 2024. Namun, peralihan sistem ini menciptakan dualisme mekanisme: petani lama masih menggunakan Kartu Tani fisik, sedangkan petani baru menggunakan sistem digital. Kondisi ini membingungkan sebagian besar petani, terutama mereka yang berusia lanjut dan memiliki keterbatasan literasi digital.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana birokrat lapangan menafsirkan ulang kebijakan nasional untuk menyesuaikan dengan konteks lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Lipsky (1980). PPL dan KPL di Banyumas tidak jarang mengambil keputusan fleksibel—misalnya tetap menerima transaksi manual menggunakan KTP—agar pelayanan kepada petani tidak terhenti. Tindakan semacam ini menunjukkan bentuk nyata dari diskresi birokrat lapangan dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Situasi transisi kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan nasional tidak selalu berjalan searah dengan implementasinya. Alih-alih meningkatkan efisiensi, dualisme sistem justru memperbesar beban koordinasi dan risiko eksklusi bagi petani kecil yang kurang adaptif terhadap teknologi. Pada konteks ini, keberhasilan kebijakan tidak semata ditentukan oleh desain regulasi pusat, tetapi sangat bergantung pada kapasitas birokrasi lokal, kejelasan komunikasi kebijakan, serta sensitivitas negara terhadap kondisi sosial petani. Tanpa pengelolaan transisi yang matang, penyederhanaan kebijakan berpotensi menciptakan ketidakpastian baru dalam akses pupuk bersubsidi.

Sosialisasi, Literasi, dan Kapasitas Birokrat Lapangan

Program sosialisasi mengenai Kartu Tani telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), namun efektivitasnya masih rendah. Banyak petani yang tidak memahami cara menggunakan kartu, terutama dalam hal aktivasi PIN, pengecekan saldo, dan transaksi melalui mesin EDC. Berdasarkan hasil wawancara, dari ratusan petani binaan hanya belasan orang yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, sementara sebagian besar lainnya tidak mengikuti karena keterbatasan

waktu, jarak, atau kurangnya minat. Petani lanjut usia mengalami kesulitan teknis seperti kartu terblokir, gagal transaksi, atau kesalahan PIN.

Keterbatasan ini juga mencerminkan tantangan bagi birokrat lapangan. Dalam kerangka Lipsky, PPL sebagai pelaksana kebijakan sering kali harus bekerja dalam kondisi serba terbatas—jumlah tenaga yang minim, wilayah kerja luas, dan tekanan administratif tinggi. Akibatnya, sosialisasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan intensif. Fenomena ini mempertegas pandangan Lipsky bahwa kinerja birokrat lapangan sangat ditentukan oleh kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. Ketika sumber daya terbatas, mereka menggunakan strategi adaptif seperti pengelompokan petani atau delegasi kepada ketua kelompok tani agar kebijakan tetap bisa berjalan, meski sering kali tidak sesuai dengan pedoman formal.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan argumen utama Lipsky (1980) bahwa kebijakan publik pada praktiknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh desain formal kebijakan, melainkan dibentuk ulang melalui interaksi antara birokrat lapangan dan realitas sosial di tingkat local. Dalam konteks Kartu Tani di Kabupaten Banyumas, ketergantungan yang tinggi pada diskresi aktor lapangan menunjukkan bahwa negara tidak hadir secara utuh melalui sistem yang stabil dan konsisten. Justru, keberlangsungan kebijakan sangat ditopang oleh improvisasi informal para PPL, pengelola KPL, dan kelompok tani. Kondisi ini memperlihatkan paradoks kebijakan: semakin kompleks sistem administratif yang dibangun, semakin besar pula ruang diskresi yang harus digunakan untuk menutup celah-celah implementasi.

Lebih jauh, diskresi yang digunakan oleh aktor lapangan tidak selalu bersifat netral. Diskresi tersebut sering kali menjadi mekanisme seleksi sosial yang menentukan siapa yang lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi dan siapa yang tersisih. Petani yang memiliki relasi baik dengan ketua kelompok tani, PPL, atau pemilik kios cenderung lebih terbantu dalam mengatasi kendala administratif, sementara petani kecil, penggarap, atau petani lanjut usia berada pada posisi yang lebih rentan. Dengan demikian,

diskresi tidak hanya berfungsi sebagai alat adaptasi kebijakan, tetapi juga berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada di pedesaan.

Jika dianalisis menggunakan kerangka pemberdayaan Naila Kabeer, kebijakan Kartu Tani di Banyumas menunjukkan ketidakseimbangan antara aspek resources, agency, dan achievement. Akses terhadap sumber daya (resources) memang diberikan melalui pupuk bersubsidi, namun akses tersebut bersifat terbatas dan sangat dikontrol oleh sistem administratif yang kaku. Pada saat yang sama, kemampuan petani untuk mengambil keputusan strategis (agency) justru melemah karena mereka tidak memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan pupuk berdasarkan kondisi riil lahan. Akibatnya, capaian akhir (achievement) berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi petani tidak terwujud secara signifikan.

Temuan ini memperkuat kritik terhadap pendekatan kebijakan berbasis digitalisasi administratif yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan petani. Alih-alih memberdayakan, Kartu Tani justru berpotensi menciptakan bentuk baru ketergantungan petani terhadap sistem birokrasi dan aktor perantara. Ketika akses pupuk ditentukan oleh kartu, mesin EDC, aplikasi, dan verifikasi berlapis, maka kegagalan sistem teknis secara langsung berimplikasi pada terganggunya proses produksi pertanian. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak serta-merta bermakna modernisasi yang inklusif.

Selain itu, perubahan kebijakan yang relatif cepat—dari Kartu Tani menuju sistem berbasis KTP melalui aplikasi iPubers—menunjukkan lemahnya konsistensi kebijakan publik di sektor pertanian. Ketidaksinambungan ini memperbesar beban adaptasi bagi petani dan birokrat lapangan sekaligus. Dalam perspektif Street-Level Bureaucracy, kondisi ini memperkuat tekanan kerja bagi pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk semakin mengandalkan diskresi sebagai jalan keluar pragmatis. Namun, diskresi yang terus-menerus digunakan tanpa kerangka akuntabilitas yang jelas berisiko mengaburkan tujuan awal kebijakan.

Dari sudut pandang politik kebijakan, implementasi Kartu Tani juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara negara dan petani. Negara hadir melalui instrumen kontrol administratif, sementara petani diposisikan sebagai objek penerima kebijakan, bukan subjek yang memiliki suara dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Minimnya ruang partisipasi petani dalam menentukan skema alokasi pupuk dan mekanisme distribusi menunjukkan bahwa kebijakan ini masih berorientasi top-down. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan utama kebijakan Kartu Tani bukan semata pada aspek teknis atau administratif, melainkan pada paradigma kebijakan itu sendiri. Selama kebijakan pupuk bersubsidi hanya difokuskan pada kontrol distribusi tanpa disertai upaya penguatan kapasitas, kemandirian, dan posisi tawar petani, maka kebijakan tersebut akan berhenti pada level pemberdayaan administratif. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan dari sekadar digitalisasi distribusi menuju pendekatan pemberdayaan substantif yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan politik petani secara lebih adil dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Banyumas tidak berjalan secara seragam dan sangat bergantung pada diskresi aktor lapangan dalam mengatasi berbagai kendala teknis maupun administratif. Diskresi tersebut memungkinkan petani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi, tetapi sekaligus memunculkan praktik-praktik informal yang memperkuat ketergantungan petani terhadap aktor perantara.

Dari perspektif pemberdayaan, kebijakan Kartu Tani belum mampu menghasilkan pemberdayaan substantif karena manfaat yang dirasakan petani masih terbatas pada aspek administratif. Meskipun kebijakan ini

membantu mengatur distribusi pupuk bersubsidi, kebijakan tersebut belum secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi maupun posisi tawar petani di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anbiya H. (2024). Program Kartu Tani: Analisis Hambatan dari Perspektif Interest Group di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023. *Journal of Politic and Goverment Studies*, 13(3), 320–334.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023. *Sensus Pertanian*, 28.
- Bogdan, R., & B. S. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson.
- Bupati Banyumas Serahkan 78.000 Kartu Tani. (2017). <https://bupati.banyumaskab.go.id/news/20352/bupati-banyumas-serahkan-78000-kartu-tani>
- Creswell JW. (n.d.). *Research Design: Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Pearson.
- Desa, D. I., Kecamatan, L., & Purworejo, K. (2019). *Peran Penyuluh Pertanian...-Akbar Mujahid* 173. 8(September), 173–186.
- Effendy, H. E. (2025). *Pengajuan Pupuk Subsidi di Banyumas Diakomodir 100% Sesuai RDKK*. <https://metrojateng.com/2025/02/11/pengajuan-pupuk-subsidi-di-banyumas-diakomodir-100-sesuai-rdtkk/>
- Elsa Catriana, S. R. D. S. (2024). *Petani di Banyumas Masih Keluhkan Sulit Mendapatkan Pupuk Subsidi*. Money.Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2024/06/10/082937726/petani-di-banyumas-masih-keluhkan-sulit-mendapatkan-pupuk-subsidi?page=all#google_vignette
- Gambaran Umum Kabupaten Banyumas. (2025). <https://ppid.banyumaskab.go.id/read/21775/gambaran-umum-kabupaten-banyumas>
- Kabeer, N. (2001). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the*

- Measurement of Women's Empowerment*. 30(3), 435–464 .
- Kementrian Pertanian. (2020). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ta 2020 (revisi)*.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Minarsih, S., Dharmawan, B., Kartika, I., & Wijaya, E. (2023). *STRATEGI MENINGKATKAN ADOPSI INOVASI PROGRAM KARTU TANI DI KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, INDONESIA*. 7, 732–742.
- Nomita, B. P., & Ramadhoni, I. (2022). *E Valuation OF The Kartu T Ani P Rogram I N S Ubsidized F Ertilizers D Itribution I N BANYUMAS R Egency , C Entral*. 5(2), 12–21.
- Nova, T., Purnomo, Y., Fathurrohman, Y. E., Pertanian, F., & Pangan, T. (2024). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Tani Terhadap Pengelolaan Usahatani Tanaman Pangan di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Pubalingga*. 7(2020). <https://doi.org/10.30595/pspfs.v7i.1216>
- Pertanian. (n.d.). <https://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43527/pertanian>
- Rahmawati, F. (2024). *Data Kartu Tani di Kecamatan Sumpiuh Divalidasi*. <https://radarbanyumas.disway.id/banyumas/read/124251/data-kartu-tani-di-kecamatan-sumpiuh-divalidasi>
- Statistik, B. P. (2025). *Data Publikasi Badan Pusat Statistik 2025*.
- Wahid, A. A., Gayatri, S., Prayoga, K., Agribisnis, P. S., Pertanian, D., Diponegoro, U., Agribisnis, P. S., Pertanian, D., Diponegoro, U., Agribisnis, P. S., Pertanian, D., & Diponegoro, U. (2021). *PROBLEMATIKA IMPELEMENTASI PROGRAM KARTU TANI DI WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK*. *Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 691–705.